

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., 2010. Manajemen Kas Daerah [WWW Document]. URL <https://syukriy.wordpress.com/2010/02/05/manajemen-kas-daerah/> (diakses 23.3.16).
- Ali, M.Z., 2015. Mengenai TEPR | Sekretariat Kabinet Republik Indonesia [WWW Document]. URL <http://setkab.go.id/mengenai-tepra/> (diakses 29.1.16).
- Badrudin, R., 2015. Rendahnya Penyerapan Anggaran Daerah [WWW Document]. URL <http://krjogja.com/analisis.kr> (diakses 28.1.16).
- Bagwell, K., Staiger, R.W., 1999. *An Economic Theory of GATT*. Am. Econ. Rev. 89, 215–248.
- BPKP, 2016. Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran oleh K/L/P [WWW Document]. URL <http://www.bkp.go.id/konten/2477/Materi-Rakornas-APIP-2016> (diakses 24.5.16).
- BPKP, 2011. Misteri Penyerapan Anggaran. BPKP DIYogyakarta Paris Review, Edisi Desember 2011.
- Chua, W.F., 1986. *Radical Developments in Accounting Thought*. Account. Rev. Vol. LXI, No. 4.
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth Edition. Sage Publications, Inc.
- Dyaningsih, A., 2015. Analisis Penumpukan Pencairan Anggaran pada Akhir Tahun di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis FEB Universitas Gadjah Mada.
- Halim, A., 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A., 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A., 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Revisi. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A., Damayanti, T., 2007. Manajemen Keuangan Daerah - Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A., Iqbal, M., 2012. Manajemen Keuangan Daerah - Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Haryanto, J.T., 2015. Perbaiki Kualitas Belanja 2015 | Kementerian Keuangan RI | Ministry of Finance of Republic of Indonesia [WWW Document]. URL <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/perbaiki-kualitas-belanja-2015> (diakses 28.1.16).

- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., n.d., 2011. *Qualitative Research Methods*. Sage Publications, Inc.
- Herriyanto, H., 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis FE Universitas Indonesia.
- Isti'anah, 2010. Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. J. Inf. Perpajak. Akunt. dan Keuang. Publik Vol. 5, No. 1, 73–84.
- Juliani, D., 2014. Pengaruh Komitmen Manajemen, Pengetahuan Peraturan, Lingkungan Birokrasi, dan Pengawasan Keluaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa. Tesis FEB Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Keuangan, R.I., 2013. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia. Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2012. APIP Kawal Penyerapan Anggaran Sejak Perencanaan [WWW Document]. URL <http://222.124.202.172/main/view/206> (diakses 31.3.16).
- Krisna, D.N.L., 2007. Teori MSDM [WWW Document]. URL <http://sdm-teori.blogspot.com/> (diakses 14.7.16).
- Kuswoyo, I.D., 2012. Analisis Atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri). Tesis FEB Universitas Gadjah Mada.
- Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Menteri Dalam Negeri, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Metrotvnews, 2016. Percepatan Penyerapan Anggaran Masih Jadi Fokus Pemerintah [WWW Document]. URL <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/01/19/472026/percepatan-penyerapan-anggaran-masih-jadi-fokus-pemerin> (diakses 31.1.16).
- Milliasih, R., 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis FE Universitas Indonesia.
- Mulyadi, 2001. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa, Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.

- Nurhayat, W., 2014. BPK Ingin Ubah Teknis Penentuan Opini WTP [WWW Document]. [detikfinance. URL http://finance.detik.com/read/2014/10/16/172844/2720995/4/bpk-ingin-ubah-teknis-penentuan-opini-wtp](http://finance.detik.com/read/2014/10/16/172844/2720995/4/bpk-ingin-ubah-teknis-penentuan-opini-wtp) (diakses 21.3.16).
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2014. Pemprov Jabar Berhasil Raih Anugerah TEPPA 2014 [WWW Document]. URL http://jabarprov.go.id/index.php/news/8349/Pemprov_Jabar_Berhasil_Raih_Anugerah_TEPPA_2014 (diakses 19.3.16).
- Republik Indonesia, 2015. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Ritonga, I.T., 2010. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Setda Bantul, 2014. Penghargaan Kabupaten Bantul di Bidang AKIP – Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul [WWW Document]. URL <http://setda.bantulkab.go.id/berita/baca/2014/12/10/145103/penghargaan-kabupaten-bantul-di-bidang-akip> (diakses 19.3.16).
- Shah, A., 2007. *Local Public Financial Management*. The World Bank.
- Solikhin, 2014. Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Akhir Tahun Anggaran pada Satuan Kerja. Tesis FEB Universitas Gadjah Mada.
- TEPPA, 2014. Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan TEPPA Semester I 2014.
- Tribun Jogja, 2014. Kendala-kendala Ini Jadi Penghambat Penyerapan APBD Bantul - Tribun Jogja [WWW Document]. URL <http://jogja.tribunnews.com/2014/04/24/kendala-kendala-ini-jadi-penghambat-penyerapan-apbd-bantul> (diakses 27.3.16).